



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRIATI DWIATMINI**
2. Jabatan : **KETUA JURUSAN ANTROPOLOGI BUDAYA**
3. NHK : **801877**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **100.544.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/48 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.544.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **109.500.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV M/T Tahun 2007, LAINNYA Rp. 60.000.000
2. MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 (4X2) M/T Tahun 2011, LAINNYA Rp. 40.000.000
3. MOTOR, HONDA NC110D CW AT (VARIO) Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / NF11B201 M/T Tahun 2013, HADIAH Rp. 5.000.000
5. MOTOR, VESPA CORSA 125 CC/ PK 125 CORSA Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **9.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **5.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **224.544.000**

III. HUTANG Rp. **13.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **211.544.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.